

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH (LPPD) TAHUN 2023**



**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah ini sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang merupakan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, supaya dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan

Penyusunan LPPD dan LKPJ berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Melalui pelaporan ini kami berharap terlihat sasaran yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Kedepannya kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di masa mendatang akan menjadi lebih baik.

Palangka Raya, Januari 2023

**KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,**



SUHARNO, ST., M.Si

Pambina Tingkat I

NIP. 196808061989031013

DAFTAR ISI	
	HALAMAN
KATA PENGANTAR	<i>ii</i>
DAFTAR ISI	<i>iii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iv</i>
DAFTAR LAMPIRAN	<i>v</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang	<i>1</i>
BAB II CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	<i>2</i>
2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	<i>2</i>
2.1.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	<i>9</i>
BAB III REALISASI ANGGARAN	<i>14</i>
BAB IV PENUTUP	<i>22</i>

DAFTAR TABEL		
		HALAMAN
1.1.	Tabel Skala Nilai Perangkat Daerah	3
1.2.	Tabel Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2023	3
1.3.	Tabel Formula Perhitungan Pengadaan Tepat Waktu	4
1.4.	Tabel Formula Perhitungan Ketersediaan Layanan Pengadaan	4
2.1.	Tabel Persentase Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	9
2.2.	Tabel Persentase Pengelolaan Katalog Lokal	9
2.3.	Tabel Jumlah OPD Infut RUP Tepat Waktu	10
2.4.	Tabel Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement	10
2.6.	Tabel Penggunaan LPSE	11
2.7.	Tabel Jumlah Pengembangan Sistem Pendukung UKPBJ	11
	Tabel Realisasi Anggaran	15

Tabel Bukti Dukung IKK		
	Tabel Progres Pelaksanaan Tender / Seleksi / Penunjukan Langsung APBD Tahun 2023	8
	Tabel Rekap Data Paket Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	9
	Tabel Rekapitilasi Pagu APBD Tahun 2023	12
	Tabel Rincian Belanja Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal	14

DAFTAR LAMPIRAN	
	HALAMAN
Lampiran I Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (OUTCOME) Tahun Anggaran 2023	23
Lampiran II Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (OUTPUT) Tahun Anggaran 2023	25
Lampiran III Matriks Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2023	26
Lampiran IV Matriks Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi Tahun 2023	27
Lampiran V Matriks Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	28
Lampiran VI Matriks Penjelasan Indikator Kinerja Kunci Hasil (OUTCOME	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta alat kontrol dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna kesejahteraan masyarakat.

BAB II CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

2.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan pada Tahun 2021-2026. Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap Tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang tercantum di dalam Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : **Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa**, dengan indikator **Pengadaan Tepat Waktu dan Tersediannya Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik**.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut digunakan.

skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada tabel VII-C dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1.Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisas Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91	Sangat tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran sesuai formula perhitungan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Skala Nilai
1.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan jasa	Pengadan Tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Ketersediaan Layanan Pengadaan secara elektronik	100%	99.99%	99.99%	Sangat Tinggi

Keterangan:

- a. Jumlah paket pengadaan selesai tepat waktu = 170 Paket dengan realisasi Rp. 768.130.039.743,-
- b. Total Jumlah paket pengadaan = 170 Paket, dengan pagu Rp. 768.130.039.743,-
- c. Jumlah Layanan Pengadaan secara elektronik = 364 hari

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisa pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1(satu) sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 .

Capaian kinerja Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir Tahun sebesar 100% berarti realisasi kinerja mampu mencapai target yang ditentukan.

Adapun Formula perhitungan capaian indikator kinerja Pengadaan Tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Formula Perhitungan Pengadan Tepat Waktu

$$\text{Pengadaan Tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah Paket Pengadaan Selesai Tepat waktu}}{\text{Total Jumlah Paket Pengadaan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk formula perhitungan capaian indikator kinerja ketersediaan Layanan pengadaan secara elektronik :

Tabel 1.4. Formula Perhitungan Ketersediaan Layanan Pengadaan

$$\text{Ketersediaan Layanan} = \frac{\text{Jumlah hari Layanan SPSE bisa diakses}}{365 \text{ Hari}} \times 100\%$$

2.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)

Indikator Kinerja Kunci atau juga yang disebut IKK (OUTCOME) adalah indikator Kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah, dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Capaian Indikator Kinerja Kunci Biro Pengadaan Barang dan Jasa berupaya melaksanakan amanat tugas penunjang Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pengadaan barang/jasa melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan capaian kinerja tujuan strategis tahun 2023 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1
Tabel 2.1. Persentase proses pemilihan pengadaan barang/jasa tepat waktu

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir	Rata-rata Capaian Akhir
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) Persen	100	100	100	100	98,08	100	99,36

Terdapat paket pekerjaan yang batal diproses karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi dan ketidaksesuaian persyaratan teknis lainnya sehingga anggaran dialokasikan kembali pada tahun 2024.

Indikator 2
Tabel 2.2 Persentase Pengelolaan Katalog Lokal

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir	Rata-rata Capaian Akhir
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) Persen	100	100	100	100	100	100	100

Pada Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tedapat penambahan etalase produk sampai dengan Desember 2023 sudah tayang sebanyak 43 etalase produk.

Indikator 3
Tabel 2.3. Jumlah OPD yang melakukan input RUP Tepat Waktu

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir	Rata-rata Capaian Akhir
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) Persen	36	36	36	36	36	36	36

Pendampingan OPD dalam penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP per desember 2023 sudah sesuai dengan dokumen anggaran dan terealisasi sebesar 36 OPD yang sudah melakukan penginfutan RUP.

Indikator 4
Tabel 2.4. Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir	Rata-rata Capaian Akhir
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) Persen	100	80	100	100	80	80	80

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah difasilitasi melalui e-procurement yaitu e-purchasing (Katalog Lokal, Toko Daring / Bela Pengadaan dan SPSE)

Indikator 5
2.6. Persentase Penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir	Rata-rata Capaian Akhir
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) Persen	100	100	100	100	100	100	100

Penggunaan SPSE difasilitasi oleh LPSE Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wadah dalam penanganan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

2.1.2 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui laporan. Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Data Capaian setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga menyajikan capaian kinerja yang dibiayai oleh dana APBD.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan persyaratan bagi pengukur kinerja, kriteria yang dipakai adalah target kerja yang ditetapkan diawal tahun melalui perencanaan kinerja (*Performance Plan*) selanjutnya diakhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*Performance Gap*) selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang (*Performance Improvement*).

2.2.3. Analisis Capaian Kinerja Kunci (OUTCOME)

Pada Indikator Kinerja Kunci Hasil Keluaran yang merupakan kinerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa meliputi 4 urusan pengadaan diantaranya :

- a). Urusan Pengadaan sumber data dari Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yaitu:
1. Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama. Hanya terdapat 1 Paket besar diatas 50 Miliar pada kuartal pertama pada tahun 2023 dan Jumlah kontrak keseluruhan pada tahun 2023 yang sudah berkontrak sebanyak 1 Paket besar diatas 50 M yang diantara 170 Paket berkontrak dengan capaian kedua elemen tersebut mencapai 100 % .
 2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. Dengan rincian Mode Kompetitif sebanyak 2.760 Paket dan Paket yang sudah dipilih dan diambil dari jumlah paket yang dilaksanakan oleh OPD 3.632 Paket dari total seluruh paket pengadaan 12.728 Paket sehingga kedua elemen tersebut mencapai 75,99 % .
 3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan. Dari data rekapitulasi yang ada ada terdapat 42 OPD yang telah terlibat belanja langsung melalui pengadaan barang/jasa dimana 30 OPD diantaranya tidak terdapat paket penyedia dalam swakelola dengan total keseluruhan yaitu 3.910.585.062.877 dan himpunan data yang sudah terinput data dari bidang PBJ total belanja Daerah khusus pengadaan barang/jasa tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.352.028.138.135 dari total Pagu sebesar Rp. 6.784.281.998.466, sehingga kedua elemen tersebut mencapai 116,66 %
 4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan rumus PDN 2023 - PDN 2022 $1.728.486.148.660 - 2.810.030.621.318 = -(\text{minus}) 1.081.544.472.658$ dengan capaian mencapai -38,49%. Ada beberapa penyebab tidak maksimalnya Penggunaan Produk Dalam Negeri diantaranya :
 - Penyebab terjadinya minus karena ketidakkonsistenan RUP
 - Antara RUP dan Produk yang dijual oleh penyedia tidak sinkron

Dari data yang telah tersaji dalam pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dicerminkan dalam indikator kinerja. Adapun hasil secara rinci yang merupakan pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) diuraikan sebagai berikut :

PROGRES PELAKSANAAN TENDER / SELEKSI / PENUNJUKAN LANGSUNG APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama OPD	Jumlah Paket	Pagu	Selesai (SPSE)			Terkontrak (SPSE)				
				Paket	(%)	Pagu (Rp.)	(%)	Paket	(%)	Kontrak (Rp.)	(%)
1	DESDM	3	11.532.93.000	3	100	11.532.93.000	100	3	100	10.110.440.500	87,67
2	DISBUDPAR	10	9.041030.000	10	100	9.041030.000	100	10	100	8.940.111.520	98,88
3	DISHUT	19	23.342.955.910	19	100	23.342.955.910	100	19	100	21.578.134.931	92,44
4	DISLUTKAN	4	70.229.836.580	4	100	70.229.836.580	100	4	100	69.953.034.480	99,61
5	DINKES	1	1.098.623.000	1	100	1.098.623.000	100	1	100	1.094.726.400	99,65
6	DISKOMINFO	2	3.850.600.000	2	100	3.850.600.000	100	2	100	3.845.428.500	99,87
7	PUPR	98	618.891.243.550	98	100	618.891.243.550	100	98	100	604.808.967.386	97,72
8	DPMPTSP	1	1.000.000.000	1	100	1.000.000.000	100	1	100	995.176.050	99,52
9	DISDIK	3	1.005.252.000	3	100	1.005.252.000	100	3	100	999.528.700	99,43
10	DISHUB	2	1.086.839.703	2	100	1.086.839.703	100	2	100	1.083.456.261	99,69
11	PERKIM	18	5.157.160.000	18	100	5.157.160.000	100	18	100	5.094.165.046	98,78
12	DINSOS	1	219.000.000	1	100	219.000.000	100	1	100	216.773.000	98,98
13	DTPHP	4	771.390.000	4	100	771.390.000	100	4	100	762.858.200	98,89
14	RSJ KALAWA ATEI	1	310.062.000	1	100	310.062.000	100	1	100	308.885.255	99,62
15	RSUD DORIS	1	20.193.113.000	1	100	20.193.113.000	100	1	100	20.051.100.000	99,30
16	BIRO UMUM	2	400.000.000	2	100	400.000.000	100	2	100	393.162.000	98,29
	Total	170	768.130.036.743	170	100	768.130.036.743	100	170	100	750.235.949.230	97,67

REKAPITULASI DATA PAKET DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023
DATA PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama OPD	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
1	BKD	250	3.481.546.465	147	6.223.183.506	0	0	397	9.704.729.971
2	KESBANGPOL	145	6.919.669.357	34	2.379.684.000	0	0	179	9.299.353.357
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET	273	20.215.725.393	65	8.880.929.543	0	0	338	29.096.717.936
4	BPBPK	278	13.350.041.859	78	13.364.671.598	0	0	356	26.714.713.457
5	BAPENDA	190	19.488.693.962	109	24.028.174.940	0	0	299	43.516.868.902
6	BPSDM	40	10.517.712.796	108	18.632.510.839	7	299.900.000	155	29.450.123.635
7	BADAN PENGHUBUNG	15	1.514.270.700	51	5.227.746.800	0	0	66	6.742.017.500
8	BAPPEDALITBANG	49	9.286.796.613	49	8.104.070.002	197	3.585.769.350	295	20.976.635.965
9	DESDM	33	29.428.127.000	38	23.650.506.630	0	0	71	53.078.633.630
10	DISBUDPAR	421	42.268.192.792	177	16.913.100.948	0	0	598	59.181.293.740
11	DISHUT	1307	231.804.240.600	138	96.879.837.144	0	0	1.445	328.684.077.744
12	DISLUTKAN	376	93.984.992.152	46	4.978.378.000	0	0	422	98.963.370.152
13	DISPENDUKPIL	182	3.041.320.313	52	1.596.953.520	0	0	234	4.638.273.833
14	DINKES	96	16.790.099.435	112	38.738.400.574	0	0	208	55.528.500.009
15	DKP	113	2.350.158.400	44	1.571.420.000	90	531.026.501	247	4.452.604.901
16	DISKOMINFO	225	43.745.670.950	98	11.320.572.910	13	302.320.448	336	55.368.564.308

No	Nama OPD	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
17	DISKOP UMKM	102	25.969.369.614	36	14.282.197.447	48	962.515.000	186	41.214.082.061
18	DLH	189	16.300.416.968	131	14.286.102.000	6	23.832.000	326	30.610.350.968
19	DINAS PUPR	412	1.325.622.419.747	292	44.009.749.277	112	4.743.437.500	816	1.374.375.606.524
20	DPMDES	117	11.926.298.727	22	17.740.442.895	120	8.069.091.460	259	37.735.833.082
21	DP3 DAN KB	23	2.456.436.403	299	9.361.047.615	0	0	252	11.817.484.081
22	DISPORA	209	8.442.255.315	69	19.383.921.635	0	0	278	27.826.176.950
23	DPMPTSP	54	4.913.327.471	28	2.963.783.745	34	511.101.684	116	8.388.212.900
24	DISDIK	797	257.830.928.623	6	1.388.564.000	0	0	803	259.219.492.623
25	DISPERINDAG	48	5.069.109.500	1	47.768.700	0	0	49	5.116.878.200
26	DISHUB	55	22.164.999.606	5	3.390.641.184	0	0	60	25.555.640.790
27	DISBUN	179	4.757.426.400	36	2.898.764.087	0	0	215	7.656.190.487
28	DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP	6	220.836.936	38	12.560.968.010	0	0	44	12.781.804.946
29	DINAS PERKIMTAN	182	116.617.031.565	668	14.098.256.017	1	170.000.000	851	130.885.287.582
30	DINSOS	194	11.568.662.463	51	2.741.595.200	0	0	245	14.310.257.663
31	DTPHP	334	98.596.712.441	53	4.079.420.611	0	0	387	102.676.133.052
32	DISNAKERTRANS	235	8.608.606.413	56	21.048.375.779	0	0	291	29.656.982.192

No	Nama OPD	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
33	INSPEKTORAT	17	2.653.858.950	38	32.536.353.180	0	0	55	35.190.212.130
34	RSJ KALAWA ATEI (PA/KPA)	220	13.309.007.207	5	358.985.200	1	6.720.200	226	13.674.712.607
35	RSJ KALAWA ATEI (BLUD)	3	544.160.000	0	0	0	0	3	544.160.000
36	RSUD DORIS SILVANUS (PA/KPA)	112	136.646.647.932	230	174.861.615.020	0	0	342	311.508.262.952
37	RSUD DORIS SILVANUS (BLUD)	130	167.832.035.102	10	55.461.345.000	0	0	140	223.293.380.102
38	RSUD HANAU (BLUD)	1	1.500.000.000	0	0	0	0	1	1.500.000.000
39	RSUD HANAU (PA/KPA))	6	3.232.718.053	0	0	0	0	6	3.232.718.053
40	SATPOL PP	14	1.197.704.200	99	22.473.401.360	0	0	113	23.671.105.560
41	SEKRETARIAT DAERAH	263	77.281.989.877	333	183.227.809.518	164	1.903.480.075	760	262.413.279.470
42	SEKRATARIAT DPRD	123	44.796.375.935	65	35.537.962.993	0	0	188	80.334.338.928
	TOTAL	8.018	2.907.399.961.755	3.917	971.299.211.427	793	21.109.194.218	12.728	3.910.585.062.877

REKAPITULASI PAGU SOPD TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA OPD	PAGU AKHIR
1	DINAS PENDIDIKAN	1.273.757.998.069
2	RSUD dr. Doris Silvanus (APBD)	306.718.974.816
3	RSUD dr. Doris Silvanus (BLUD)	180.000.000.000
4	RSJ KALAWA ATEI (APBD)	33.480.918.180
5	RSJ KALAWA ATEI (BLUD)	1.999.400.000
6	DINAS KESEHATAN	91.944.667.520
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.457.451.485.846
8	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	126.351.828.923
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.609.615.460
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	31.243.979.498
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.309.433.559
12	DINAS SOSIAL	115.173.904.443
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	32.403.320.992
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERKUALITAS	19.127.143.955
15	DINAS KETAHANAN PANGAN	11.270.790.401
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35.189.568.160
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.496.832.040
18	DINAS PERHUBUNGAN	33.419.451.835
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	43.264.813.891
20	DINAS KOPERASI DAN UMKM	46.189.404.081
21	DINAS PENANAMAN MODAL PTSP	17.121.821.680
22	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	35.136.479.560
23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	169.415.865.780
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	12.608.745.510
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	113.343.474.803

No	NAMA OPD	PAGU AKHIR
26	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	146.766.288.859
27	DINAS PERKEBUNAN	21.471.891.210
28	DINAS KEHUTANAN	397.824.076.861
29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	53.078.633.630
30	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	36.894.407.330
31	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.422.757.007
32	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	209.799.446.638
33	BIRO HUKUM	3.975.037.609
34	BIRO PEREKONOMIAN	17.725.366.907
35	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.770.316.001
36	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.321.634.559
36	BIRO ORGANISASI	2.409.397.750
38	BIRO UMUM	119.877.860.442
39	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	5.734.978.297
40	SEKRETARIAT DPRD	111.431.179.660
41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27.011.197.130
42	BADAN KEUANGAN DAN ASET	1.122.580.393.873
43	BADAN PENDAPATAN DAERAH	114.945.896.019
TOTAL		6.784.281.998.552

RINCIAN PAGU BELANJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DAN BELANJA MODAL

URAIAN	JUMLAH
BELANJA OPERASI	3.877.015.171.951
Belanja Pegawai	1.523.190.553.071
Belanja Barang dan Jasa	1.545.037.203.676
Belanja Subsidi	122.300.500
Belanja Hibah	698.860.948.464
Belanja Bantuan Sosial	109.804.166.240
BELANJA MODAL	1.806.990.934.459
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.455.181.110
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	984.392.437.693
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	530.572.102.656
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.571.213.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	107.122.806.028
Belanja Tidak Terduga	107.122.806.028
BELANJA TRANSFER	993.153.086.114
Belanja Bagi Hasil	961.453.086.114
Belanja Bantuan Keuangan	31.700.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH	6.784.281.998.552
Jumlah Belanja Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal	3.352.028.138.135

PENGHITUNGAN PAKET BERDASARKAN METODE PENGADAAN

NO	KOMPETITIF / NON KOMPETITIF	METODE PENGADAAN	JUMLAH PAKET
1	Metode Kompetitif	Pembayaran Tahun Jamak	1
		Tender	56
		Seleksi	90
		E-Purchasing	2.613
		TOTAL	2.760
2	Metode Non Kompetitif	Swakelola	7
		Penunjukan Langsung	42
		Pengadaan Langsung	823
		TOTAL	3.632

PENGHITUNGAN PAKET BERDASARKAN JENIS PENGADAAN

NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	PERSENTASE (%)
1	Pengadaan Barang	2.032 Paket	50,5 %
2	Pekerjaan Kontruksi	659 Paket	16,4 %
3	Jasa Konsultansi	899 Paket	24,4 %
4	Jasa Lainnya	431 Paket	10,7 %

PENGHITUNGAN PAKET BERDASARKAN CARA PENGADAAN

NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	PERSENTASE (%)
1	Penyedia	3.872 Paket	96,1 %
2	Penyedia Swakelola	149 Paket	7,3 %
3	Swakelola	10 Paket	0,2 %

PENGHITUNGAN PAKET BERDASARKAN SUMBER DANA

NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	PERSENTASE (%)
1	APBD	3.183 Paket	79,02 %
2	APBDP	781 Paket	19,39 %
3	BLUD	58 Paket	1,42 %
4	Lainnya	7 Paket	10,7 %

PENGHITUNGAN PAKET BERDASARKAN KATEGORI PENGADAAN

NO	JENIS PENGADAAN	NILAI	PERSENTASE (%)
1	PDN	1,9 Triliun	34,81 %
2	UMKM	1,4 Triliun	26,64 %
3	PRADIPA	264 Miliar	4,91 %

BAB III REALISASI ANGGARAN

Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.553.501.036 dan terealisasi sebesar Rp. 3.376.625.755 atau 95,02 %. Realisasi anggaran tahun 2023 yang dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dan indikator ditampilkan dalam tabel berikut ini :

No .	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			2.146.366.820	2.069.464.320	2.086.447.663	97%
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		18.000.000	18.000.000	17.936.700	99,65%
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%

No .	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%
			<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3.000.000	3.000.000	2.936.700	97,89%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		104.520.000	104.520.000	103.754.100	99,27%

No .	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	101.520.000	101.520.000	101.520.000	100,00%
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3.000.000	3.000.000	2.234.100	74,47%
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	-	-		0,00%
			<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	-	-		0,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		192.375.100	192.375.100	168.944.850	87,82%
			<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	45.900.000	45.900.000	33.450.000	72,88%

No .	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	46.512.000	46.512.000	45.055.300	96,87%
			<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	99.963.100	99.963.100	90.439.550	90,47%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.400.369.000	1.323.466.500	1.366.288.893	97,57%
			<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	1.053.799.000	1.053.799.000	1.032.757.867	98,00%
			<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	30.710.000	30.710.000	30.623.000	99,72%
			<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	8.250.000	8.250.000	7.335.000	88,91%
			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	307.610.000	230.707.500	295.573.026	96%

No .	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		414.252.720	414.252.720	413.966.520	99,93%
			<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.800.000	4.800.000	4.800.000	100,00%
			<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	304.306.200	304.306.200	304.200.000	99,97%
			<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	1.500.000	1.500.000	1.320.000	88,00%
			<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	103.646.520	103.646.520	103.646.520	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.850.000	16.850.000	15.556.600	92,32%
			<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	16.850.000	16.850.000	15.556.600	92,32%

No .	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			1.407.134.216	1.379.634.216	1.290.178.092	93,52%
		<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>		316.065.520	316.065.520	284.118.852	89,89%
			<i>Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	72.415.520	72.415.520	57.491.300	79,39%
			<i>Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	46.390.000	46.390.000	29.367.600	63,31%
			<i>Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	197.260.000	197.260.000	197.259.952	100,00%
		<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>		481.394.480	453.894.480	439.802.540	96,90%
			<i>Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik</i>	301.046.480	301.046.480	264.432.180	87,84%

No .	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	110.000.000	82.500.000	106.203.360	96,55%
			<i>Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	70.348.000	70.348.000	69.167.000	98,32%
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		609.674.216	609.674.216	566.256.700	92,88%
			<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa</i>	112.074.000	112.074.000	105.376.217	94,02%
			<i>Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	205.044.216	205.044.216	201.772.055	98,40%
			<i>Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</i>	292.556.000	292.556.000	259.108.428	88,57%

No .	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL				3.553.501.036	3.449.098.536	3.376.625.755	95,02%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, laporan ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target Indikator Kinerja Pemerintah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3. 553.501.036,- dengan realisasi sebesar Rp. 3. 376.625.755,- atau 95,02%. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagai gambaran kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

LAMPIRAN I

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) TAHUN ANGGARAN 2023

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Elemen 1	Elemen 2	Capaian	Keterangan / Sumber Data
4.i.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.&n bsp; yang ditandatangani i pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n? jumlah kontrak keseluruhan tahun n?	1 Paket (Rp. 62.151.835.798)	1 Paket Terkontrak Nilai Diatas 50 M dan 170 Paket Terkontrak Total Keseluruhan (Rp. 750.235.949.231)	100 %	Biro PBJ
4.i.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif? Jumlah Seluruh Pengadaan	2.760 Paket	3.632 Paket	75,99 %	Biro PBJ
4.i.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan? Total belanja daerah?	Rp. 3.910.585.062.552	Rp. 3.352.028.138.135	116,66%	Biro PBJ

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Elemen 1	Elemen 2	Capaian	Keterangan / Sumber Data
4.i.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)? Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)?	Rp. -1.081.544.472.658	Rp. 2.810.030.621.318	-38,49 %	Biro PBJ

LAMPIRAN II

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN 2023

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Output	Elemen	Keterangan/ Sumber Data
				TIDAK TERDAPAT IKK OUTPUT TERKAIT PERANGKAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		

LAMPIRAN III

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA APBD TAHUN 2023

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program / Kegiatan	Target (Outcome / Output)	Realisasi (Outcome / Output)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	Penunjang Urusan Daerah Provinsi	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Optimalisasi kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perencanaan yang berlaku	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang	Pengadaan Tepat Waktu	100 %	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM PBJ selalu dilakukan melalui ketersediaan anggaran DIKLAT
					Ketersediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99,99 %	-	-	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah terealisasi di Tahun 2022

LAMPIRAN IV

MATRIKS KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU PUSAT YANG DILAKSANAKAN DAERAH PROVINSI

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas (TP)	Program/ Kegiatan/Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tidak Terdapat Program Pelaksanaan Tugas Pembantu Pusat Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah								

LAMPIRAN V

MATRIKS KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

No	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN /MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Pembentukan Tim <i>Clearing House</i>	• Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota • Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah • Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/69/2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa	Untuk Mengantisipasi, Mencegah dan Menyelesaikan Permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga Clearing House sebagai wadah/forum membahas dan mencari solusi atas permasalahan atau potensi permasalahan

LAMPIRAN VI

MATRIKS PENJELASAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) LPPD 2023